

STATISTIK PENDIDIKAN *PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT*

2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

STATISTIK PENDIDIKAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2019



STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2019

ISBN :
No. Publikasi : 52520.2005
Katalog BPS : 4301002.52

Naskah:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Desain Tata Letak:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber Gambar Cover:

BPS Kabupaten Lombok Utara

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mataram: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019

xv+ 54 halaman; 17,6 x 25 cm

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tim Penyusun

Pengarah :

Suntono, SE, M.Si

Koordinator Teknis :

Arrief Chandra Setiawan, S.ST, M.Si

Naskah :

Ratna Asih Wulandari, S.ST, M.Ak.

Pengolah Data :

Ratna Asih Wulandari, S.ST, M.Ak.

Gambar Kulit :

Ratna Asih Wulandari, S.ST, M.Ak.

Ayub Abdul Rahman, S.ST

Infografis :

Ayub Abdul Rahman, S.ST

Penyunting :

M Ikhsany Rusyda, S.ST, M.Si

Yati Daryati Nurmalasari, S.ST

Isna Zuriatina, S.ST, MT

Ayub Abdul Rahman, S.ST



KATA PENGANTAR

Pendidikan dipercaya sebagai salah satu jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Pembangunan harus dapat menjamin kualitas pendidikan guna membentuk sumber daya manusia yang tangguh, berdaya saing dan dan mampu meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Capaian pembangunan pendidikan tahun 2019 dapat dipotret dari indikator yang tersaji dalam Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. Data diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019. Publikasi ini diharapkan menjadi rujukan yang dapat digunakan sebagai evaluasi dan rekomendasi dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

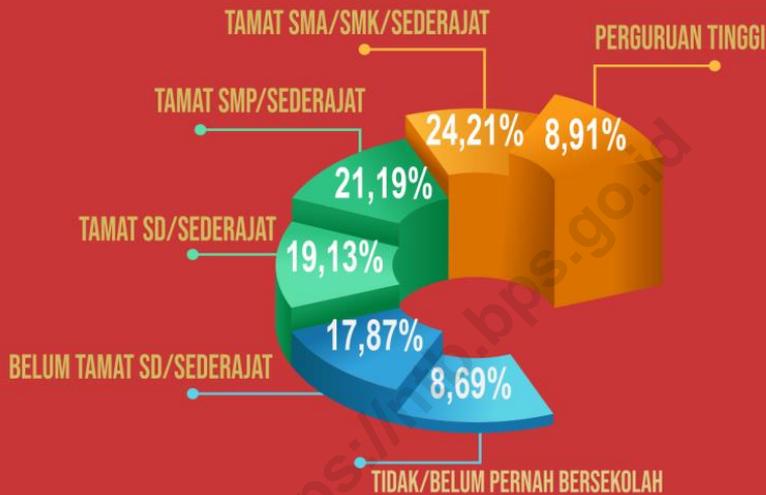
Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan publikasi di masa yang akan datang.

Mataram, Mei 2020
Kepala BPS Provinsi NTB,

SUNTONO

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Persentase Penduduk 15 Tahun keatas Menurut Ijazah Terakhir



Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk 15 Tahun keatas



Pada tahun 2019, Angka Melek Huruf Penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi NTB sebesar

87,59%

Terdiri dari:

AMH penduduk 15-24	99,92 %
AMH penduduk 15-59	92,54 %

APK PAUD (Anak usia 3-6 tahun)

42,29 %



RINGKASAN

Pendidikan merupakan hak semua warga negara seperti tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah selalu mengupayakan pembangunan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, tanpa melihat umur, gender, kemampuan ekonomi, keterbatasan fisik, dan sebagainya.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mencanangkan Program Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk di dalamnya Pendidikan Anak Usia dini dan Wajib Belajar. Capaian pembangunan pendidikan untuk dua program tersebut dapat dilihat dari angka partisipasi. Angka partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) di NTB untuk anak usia 3-6 tahun sebesar 42,29 persen. APK PAUD anak perempuan (43,91 persen) lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (40,74 persen). Namun capaian ini masih jauh dari target RPJMN tahun 2019 sebesar 77,20 persen.

Partisipasi penduduk bersekolah pada jenjang tertentu dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Nilai APK semakin menurun untuk jenjang pendidikan menengah. APK untuk jenjang SD sederajat (108,50) lebih dari 100 persen. Artinya selain anak usia 7-12 tahun, terdapat anak usia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun yang bersekolah di tingkat SD. Nilai APK SMP 92,07 dan APK SMA 90,86. Angka partisipasi untuk SMP dan SMA berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan. Partisipasi sekolah menengah juga berbeda menurut tingkat ekonomi keluarga.

Angka Melek Huruf (AMH) untuk penduduk 15 tahun ke atas sebesar 87,59 persen. Capaian AMH ini masih jauh di bawah target AMH pada RPJMN 2019 96,1 persen. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di NTB 7,27 tahun atau setara kelas 1 SMP. Sebanyak 26,56

persen penduduk 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah dan hanya 8,91 persen yang menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

<https://ntb.bps.go.id>



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Tujuan	2
Sumber Data	2
Sistematika Penulisan	3
KONSEP DEFINISI	5
Konsep Definisi	5
PARTISIPASI SEKOLAH	11
Partisipasi Siswa pada Pendidikan Usia Dini (PAUD)	12
Partisipasi Sekolah	16
Angka Partisipasi Sekolah	19
Angka Partisipasi Kasar	20
Angka Partisipasi Murni	22
CAPAIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	25
Angka Melek Huruf	25
Rata-rata Lama Sekolah	28
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	29
PENUTUP	31
LAMPIRAN TABEL	33



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Partisipasi Sekolah Menurut Target Tahun 2019 RPJMN dan dan Capaian Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	1
Tabel 3.2. Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019	17
Tabel 3.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019.....	19
Tabel 3.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019.....	21
Tabel 3.5. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019.....	23
Tabel 4.1. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun ke Atas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019.....	26

<https://indonesia.go.id>



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Partisipasi Pendidikan Usia 0-6 Tahun yang Pernah/ Sedang Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019	13
Gambar 3.2.	Partisipasi Pendidikan Usia 0-6 Tahun yang Pernah/ Sedang Mengikuti PAUD Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019	13
Gambar 3.3.	APK Pendidikan Anak Usia Dini Usia 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019	14
Gambar 3.4.	APM Pendidikan Anak Usia Dini Usia 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019	15
Gambar 3.5.	Angka Kesiapan Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019	16
Gambar 3.6.	Persentase Penduduk 7-24 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019	18
Gambar 4.1.	Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019	28
Gambar 4.2.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017-2019	29
Gambar 4.3.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019	30



DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019.....	35
Tabel 2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019.....	36
Tabel 3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019.....	37
Tabel 4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019.....	38
Tabel 5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019.....	39
Tabel 6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019.....	40
Tabel 7.	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD) Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019.....	41
Tabel 8.	Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019.....	42
Tabel 9.	Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019.....	43
Tabel 10.	Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019	44
Tabel 11.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019	45
Tabel 12.	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019.....	46
Tabel 13.	Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan, 2019	57
Tabel 14.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan, 2019	48

Tabel 15.	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan, 2019	49
Tabel 16.	Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2019.....	50
Tabel 17.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2019	51
Tabel 18.	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2019	52
Tabel 19.	Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Menurut Partisipasi Pra Sekolah, 2019.....	53
Tabel 20.	Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2019	54

<https://ntb.bps.go.id>



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terjaminnya kualitas pendidikan yang merata dan inklusif serta meningkatkan kesempatan sepanjang hayat menjadi tujuan keempat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di Indonesia, pembangunan pendidikan dipercaya sebagai bagian dalam menciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Muara pembangunan pendidikan tercermin dalam tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Isu pendidikan seperti pendidikan tidak merata, diskriminasi gender dalam pendidikan, pendidikan berkualitas itu “mahal” juga menjadi perhatian masyarakat global sehingga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berkomitmen untuk mewujudkan Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) yang berisikan tujuan: (1) memperluas pendidikan usia dini, (2) menyediakan pendidikan dasar yang gratis dan wajib (Wajib Belajar), (3) meningkatkan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), (4) meningkatkan angka melek huruf, (5) menghapus kesenjangan gender, dan (6) meningkatkan mutu pendidikan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain pengembangan akses terhadap pendidikan anak usia dini, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, evaluasi dan perbaikan kurikulum serta peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru. Dengan pembangunan pendidikan yang berkualitas, masyarakat mempunyai daya saing

dan kompetensi yang baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga kualitas hidup dapat lebih baik dari generasi sebelumnya.

Perkembangan pembangunan bidang pendidikan dipantau secara berkesinambungan berdasarkan atas data dan indikator. Indikator pendidikan menggambarkan kondisi dan perkembangan pendidikan secara tepat antara lain, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), rata-rata lama sekolah dan Partisipasi pendidikan pra-sekolah (PAUD). Data disajikan menurut jenis kelamin, tipe daerah, dan keadaan ekonomi rumah tangga. Penyajian data ini diharapkan mampu menggambarkan kemajuan pembangunan pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Tujuan

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun untuk menggambarkan kemajuan pembangunan di sektor pendidikan Provinsi NTB. Gambaran yang menyeluruh dapat dilihat dari indikator partisipasi sekolah dan capaian pembangunan pendidikan. Dengan informasi dari indikator-indikator pendidikan dapat bermanfaat sebagai referensi dalam perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pada program Wajib Belajar 9 tahun dan kebijakan program lainnya di sektor pendidikan Provinsi NTB. Selain itu, data dan informasi yang ada dapat dijadikan bahan kajian penelitian di Provinsi NTB.

Sumber Data

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan data hasil pengolahan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang diselenggarakan BPS pada Maret 2019. Survei ini mengumpulkan data tentang pendidikan seperti partisipasi sekolah, kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan; keterangan umum anggota rumah tangga seperti gender, usia; serta kondisi ekonomi rumah tangga terkait pengeluaran.

Sistematika Penyajian

Publikasi ini tersusun dalam 4 (empat) bab. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, sumber data, dan sistematika. Bab II Konsep Definisi menjelaskan konsep definisi yang dipakai. Bab III membahas tentang Partisipasi Sekolah yang dijabarkan dalam partisipasi siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni. Bab IV memberikan paparan tentang capaian pembangunan pendidikan yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Bab V berisi penutup. Lampiran menyajikan tabel tentang indikator pendidikan menurut kabupaten/kota.



KONSEP DEFINISI

Agar terhindar dari salah pengertian dalam membaca dan memahami data, berikut dijelaskan konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini:

- a) **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel, yaitu kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.
- b) **Blok Sensus** adalah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS.
- c) **Rumah Tangga Biasa dan Rumah Tangga Khusus**
Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.
Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) berjumlah 10 orang atau lebih.

d) **Kepala Rumah Tangga (KRT) dan Anggota Rumah Tangga (ART)**

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

e) **Biaya pendidikan** adalah semua biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan, baik yang sudah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan (berupa uang atau barang) untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan responden.

f) **Bantuan Pendidikan** adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang bukan karena prestasi, baik berupa uang atau barang, seperti : Beasiswa Miskin, Bantuan Pendidikan dari PNPM (buku, sepatu, uang transport), beasiswa yang diperoleh karena tugas belajar dan sekolah ikatan dinas. Sumber beasiswa/bantuan pendidikan bisa berasal dari BSM (Bantuan Siswa Miskin; bantuan/beasiswa pemerintah lainnya; lembaga nonpemerintah; sekolah maupun perorangan).

g) **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Paket A/B/C).

Pendidikan formal maupun nonformal yang dimaksud di sini adalah yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian lainnya.

h) **Pendidikan anak usia dini (PAUD)** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

i) **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

j) **Partisipasi Pendidikan**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi berikut:

$$APS_{7-12} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 7 – 12 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{13-15} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 13 – 15 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{16-18} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 16 – 18 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

$$APM_{SD} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 7 – 12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM_{SMP} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SMP Usia 13 – 15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM_{SMA} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SMA Usia 16 – 18 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

$$APK_{SD} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APK_{SMP} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SMP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APK SMA} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SMA}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

- k) **Angka Melek Huruf (AMH)** adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin, huruf Arab, atau huruf Lainnya.
- l) **Tamat sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- m) **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.
- SD/MI** meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, SD luar biasa, dan Paket A.
- SMP/MTs** meliputi jenjang pendidikan SMP, Madrasah Tsanawiyah, SMP luar biasa, dan Paket B.
- SM/MA** meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), SMLB, MAK, dan Paket C.
- PT** meliputi jenjang pendidikan Diploma I/II/III, DIV/S1, S2 dan S3.
- n) **Kuantil pengeluaran** adalah pengelompokan pengeluaran per kapita sebulan kedalam lima kelompok yang sama besar setelah diurutkan mulai pengeluaran terkecil hingga terbesar.



PARTISIPASI SEKOLAH

Pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun, sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Indikator tentang partisipasi sekolah terutama sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dapat menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merumuskan sasaran pembangunan pendidikan dengan target pencapaian tahun 2019 dan pencapaian tahun 2018 di Provinsi NTB sebagai berikut:

Tabel 3.1. Partisipasi Sekolah Menurut Target Tahun 2019 RPJMN dan Capaian Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indikator	Target Tahun 2019 RPJMN	Capaian Tahun 2018 Provinsi NTB*	Perbandingan target 2019 dan capaian 2018
APK PAUD*	77,20	40,33	(-)
APM SD/MI	94,80	98,86	(+)
APK SD/MI/SDLB/Paket A	114,10	108,82	(-)
APM SMP/MTs	82,00	83,88	(+)
APK SMP/MTs/Paket B	106,90	93,83	(-)
APM SMA/MA/SMK	67,50	65,77	(-)
APK SMA/MA/SMK/Paket C	91,60	89,64	(+)

* Anak usia 3-6 tahun

sumber: Susenas Maret 2018, diolah

Semakin tinggi nilai indikator dapat diartikan semakin efektif program pemerintah mensukseskan program wajib pendidikan dasar yang merata. Melihat capaian tahun 2018 di atas, angka partisipasi PAUD, angka partisipasi kasar (APK) untuk jenjang SD sederajat, SMP sederajat, serta APM SMA masih lebih rendah dibanding target RPJMN. Ini dapat menjadi acuan guna

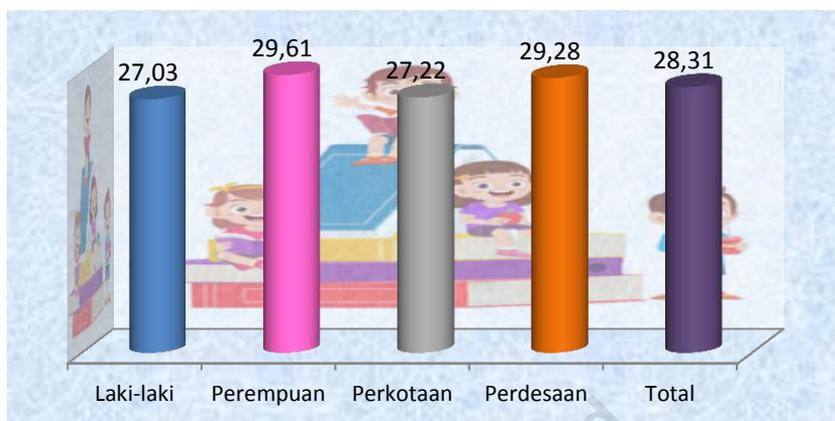
penyusunan program dan kebijakan sektor pendidikan di NTB. Untuk capaian tahun 2019, akan dijabarkan pada bahasan berikut.

Partisipasi Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Masa perkembangan anak dimulai dari masa awal kehidupan, sejak di dalam kandungan hingga usia tiga tahun. Perkembangan kesehatan otak dapat akan baik jika anak mendapat asupan nutrisi, perlindungan, stimulus seperti berbicara, bermain dan mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya usia 2-5 tahun anak belajar kemampuan kognitif dan motorik seperti berbahasa, bermain dengan teman, meningkatnya keingintahuan, mengendalikan tangan dan jari, serta perkembangan emosional seperti menyampaikan perasaan, keinginan untuk berbagi.

Mengingat penting tumbuh kembang anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa nanti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung pendidikan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Secara umum, tujuan diselenggarakannya PAUD adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya dan menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan formal berikutnya. Pemerintah berkomitmen menjaga akses dan kualitas PAUD dengan penerbitan beberapa peraturan tentang PAUD. Dukungan pemerintah lainnya untuk pendidikan usia dini adalah peningkatan dan perluasan pelayanan PAUD, penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas PAUD, pemerataan PAUD hingga daerah-daerah terpencil, program satu desa satu PAUD, peningkatan kualitas guru atau pengajar PAUD, dan menentukan standar penyelenggaraan PAUD. Dengan program ini, diharapkan anak usia 3-6 tahun mendapatkan stimulasi positif untuk fisik dan otaknya, serta mendapatkan pendidikan dan penanaman moral yang akan berguna bagi kehidupannya di masa depan.

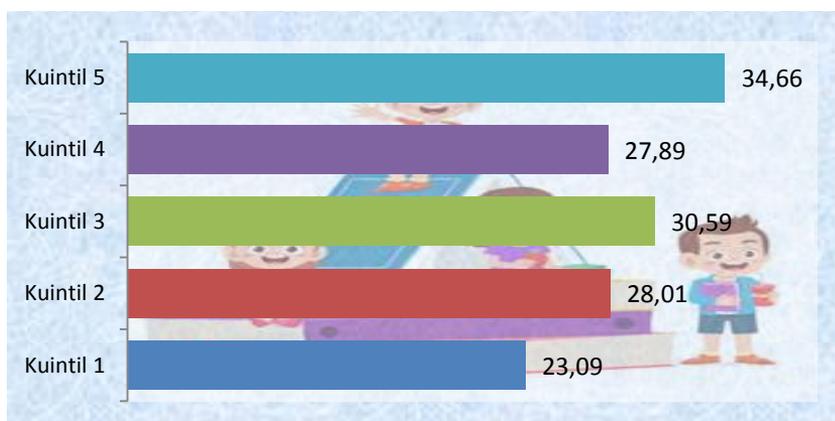
Gambar 3.1. Partisipasi Pendidikan Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah

Pengolahan data Susenas Maret tahun 2019, menunjukkan bahwa angka partisipasi PAUD (0-6 tahun) di Provinsi NTB mencapai 28,31 persen. Berdasarkan jenis kelamin, angka partisipasi PAUD anak perempuan (29,61 persen) lebih tinggi dibanding anak laki-laki (27,03 persen). Untuk daerah perkotaan, 27,22 persen partisipasi PAUD dan 29,28 persen untuk daerah perdesaan.

Gambar 3.2. Partisipasi Pendidikan Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti PAUD Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019

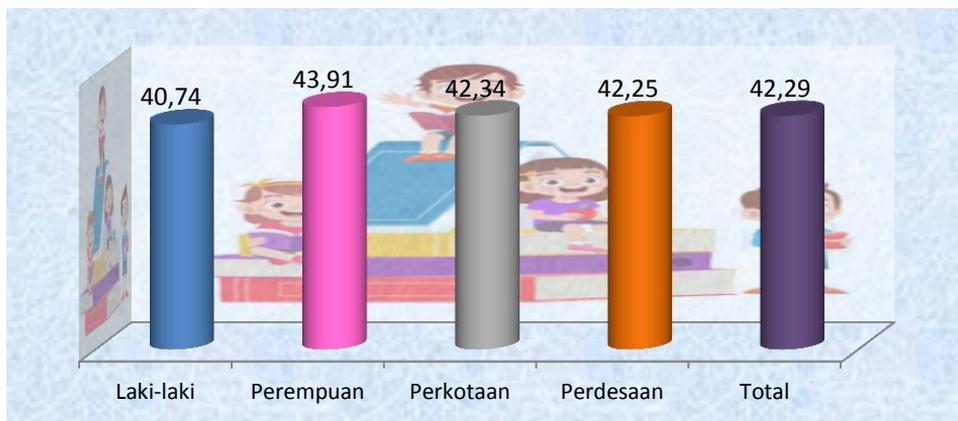


Sumber: Susenas Maret 2019, diolah

Rumah tangga dapat dikategorikan menurut kelompok pengeluaran. Dalam publikasi ini, rumah tangga terbagi menjadi 5 (lima) kuintil. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga, semakin besar kelompoknya (kuintil). Pengeluaran tertinggi berada di kelompok 5. Partisipasi pendidikan pra-sekolah untuk anak usia dini (0-6) tahun disajikan pada gambar 3.2. Jika dilihat dari kuintil pengeluaran rumah tangga, partisipasi PAUD tertinggi berada pada kuintil ke-5 yaitu sebesar 34,66 persen, diikuti kuintil ke-3 kemudian kuintil ke-4 dan ke-2. Partisipasi PAUD terendah pada kuintil 1, hanya sebesar 23,09 persen.

Target RPJMN untuk tahun 2019, partisipasi PAUD untuk anak usia 3-6 tahun adalah 77,2 persen. Provinsi NTB pada bulan Maret 2019, APK PAUD mencapai 42,29 persen. Di daerah perkotaan, APK PAUD 42,34 persen sedangkan di perdesaan 42,25 persen. APK PAUD anak laki-laki 40,74 persen sedangkan anak perempuan 43,91 persen. Anak usia dini belum bisa terlalu dipaksa mengikuti pembelajaran. Belajar sambil bermain lebih ditekankan agar anak tertarik dan bersemangat untuk mengikuti lagi kegiatan PAUD pada keesokan harinya.

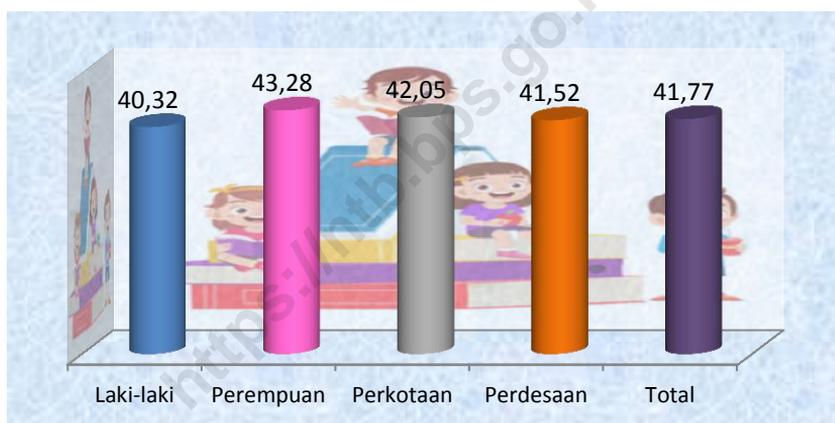
Gambar 3.3. APK Pendidikan Anak Usia Dini Usia 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah

Proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang bersesuaian dikenal sebagai APM PAUD. APM PAUD menunjukkan persentase anak yang benar-benar mengenyam PAUD pada usia yang bersesuaian. APM PAUD anak usia 3-6 tahun di Provinsi NTB Maret 2019 mencapai 41,77 persen. Di daerah perkotaan, APM PAUD 42,05 persen sedangkan di perdesaan 41,52 persen. APM PAUD anak laki-laki 40,32 persen sedangkan anak perempuan 43,28 persen.

Gambar 3.4. APM Pendidikan Anak Usia Dini Usia 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah

Penyelenggaraan PAUD mempunyai tujuan diantaranya menyiapkan anak untuk siap memasuki pendidikan formal (Sekolah Dasar). Indikator yang tepat untuk mengukur kesiapan anak masuk SD adalah Angka kesiapan sekolah (AKS). AKS dihitung dengan membagi jumlah anak yang duduk di bangku kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD di tahun ajaran sebelumnya dengan jumlah seluruh siswa kelas 1 SD. AKS di Provinsi NTB Maret 2019 sebesar 67,67 persen. Angka kesiapan sekolah di perdesaan lebih rendah dibanding di perkotaan. Menurut gender, anak perempuan lebih siap untuk sekolah SD dibandingkan anak laki-laki.

Gambar 3.5. Angka Kesiapan Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah

Partisipasi Sekolah

Gemilang atau tidaknya masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas penduduk usia muda, termasuk penduduk usia sekolah. Usia 7-24 tahun merupakan rentang usia sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat menetapkan usia minimal untuk peserta didik baru TK dan SD serta usia maksimal untuk SMP, SMA, SMK dan sederajat. Usia peserta didik baru untuk Taman Kanak-kanak kelompok A (TK A) adalah 4-5 tahun dan kelompok B (TK B) 5-6 tahun. Peserta didik baru kelas 1 Sekolah Dasar berusia 7 tahun, minimal berumur 6 tahun pada 1 Juli tahun berjalan atau berusia 5 tahun 6 bulan untuk anak yang memiliki kecerdasan istimewa yang didukung oleh rekomendasi tertulis psikolog profesional. Batas atas usia jenjang SMP adalah 15 tahun dan SMA 21 tahun.

Salah satu bentuk penilaian tentang pemanfaatan fasilitas pendidikan dilihat dari partisipasi sekolah. Terdapat tiga kategori partisipasi sekolah yaitu tidak/belum pernah bersekolah, sedang bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Berikut adalah tabel tentang partisipasi sekolah penduduk usia 5 tahun ke atas.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019

	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/belum pernah bersekolah	Sedang Bersekolah	Tidak bersekolah lagi
Total	10,36	27,94	61,70
Jenis Kelamin			
Laki-laki	7,80	29,91	62,29
Perempuan	12,75	26,09	61,15
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	9,41	29,12	61,47
Perdesaan	11,25	26,82	61,92
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	15,23	29,08	55,69
Kuintil 2	10,85	29,47	59,68
Kuintil 3	11,77	26,89	61,34
Kuintil 4	8,82	26,47	64,71
Kuintil 5	5,48	27,86	66,66

Sumber: Susenas Maret 2019, diolah

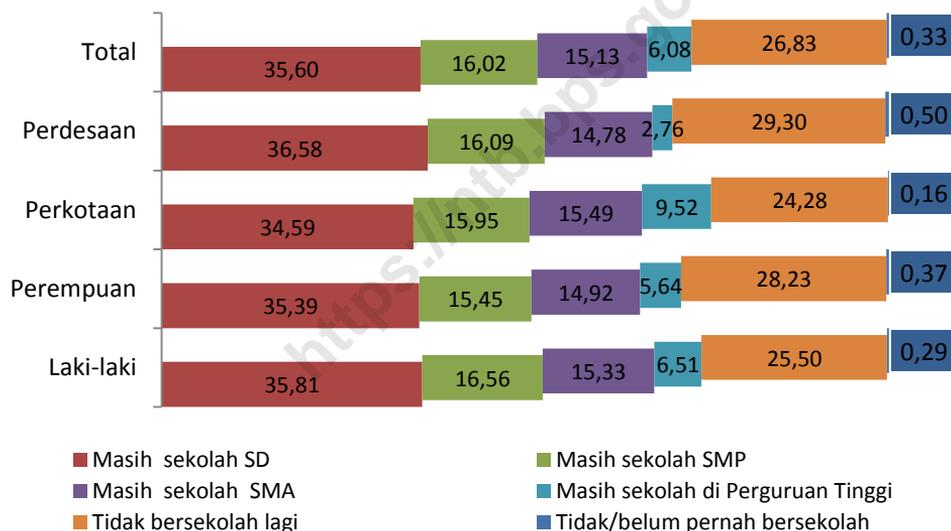
Sebanyak 27,94 persen penduduk 5 tahun ke atas yang sedang bersekolah, 61,70 persen tidak bersekolah lagi dan 10,36 persen yang tidak/belum bersekolah. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk 5 tahun ke atas laki-laki yang tidak/belum bersekolah lebih sedikit dibandingkan penduduk 5 tahun ke atas perempuan. Namun sebaliknya penduduk 5 tahun ke atas laki-laki yang sedang bersekolah dan tidak bersekolah lagi mempunyai persentase yang lebih tinggi dibandingkan penduduk 5 tahun ke atas perempuan.

Dilihat dari daerah tempat tinggal, penduduk 5 tahun ke atas perkotaan yang tidak/belum bersekolah lebih sedikit dibandingkan penduduk 5 tahun ke atas perdesaan. Namun persentase penduduk 5 tahun ke atas yang sedang bersekolah di perkotaan lebih banyak dibanding dengan yang tinggal di perdesaan. Untuk persentase penduduk 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah

lagi tidak terdapat perbedaan berarti antara yang tinggal di perkotaan dan perdesaan.

Jika ditelusuri lebih lanjut, untuk penduduk usia sekolah 7-24 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah mendekati nol persen. Penduduk 7-24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD, SMP, SMA, sebanyak 72,83 persen dari total penduduk 7-24 tahun, sedangkan yang sudah tidak bersekolah lagi sebanyak 26,83 persen. Tidak ada perbedaan yang berarti dari sisi gender maupun daerah tempat tinggal untuk persentase penduduk 7-24 tahun yang bersekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA.

Gambar 3.6. Persentase Penduduk 7-24 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah

Untuk partisipasi penduduk 7-24 tahun yang sedang bersekolah di Perguruan Tinggi, di wilayah perkotaan lebih besar dibanding penduduk kelompok umur yang sama di perdesaan. Namun dari sisi gender, partisipasi penduduk 7-24 tahun laki-laki yang sedang bersekolah di Perguruan Tinggi sedikit di atas persentase penduduk perempuan kelompok umur tersebut. Persentase penduduk usia 7-24 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi, di

daerah perkotaan lebih rendah dibanding perdesaan, dan penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk perempuan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu, maka dilakukan penghitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan, seperti SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun).

Tabel 3.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019

	Kelompok Umur (tahun)		
	7-12	13-15	16-18
Total	99,46	97,92	77,51
Jenis Kelamin			
Laki-laki	99,30	98,25	78,48
Perempuan	99,61	97,55	76,51
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	99,88	99,50	82,40
Perdesaan	99,08	96,45	72,99
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	98,40	96,25	71,57
Kuintil 2	99,65	98,39	77,06
Kuintil 3	99,77	97,45	74,65
Kuintil 4	99,66	98,20	80,82
Kuintil 5	100,00	100,00	82,21

Sumber: Susenas Maret 2019, diolah

APS SD (99,46 persen) mendekati 100 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7-12 tahun di NTB sedang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar.

Sementara pada jenjang pendidikan SMP (13-15 tahun) baru mencapai 97,92 persen, artinya masih ada 3 anak dari 100 anak yang putus sekolah. Pada jenjang pendidikan SMA (16-18 tahun), angka APS baru mencapai 77,51 persen. Hanya 3 dari 4 anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di SMA dan sederajat.

Menurut jenis kelamin, APS perempuan kelompok umur 7-12 tahun lebih tinggi dari APS laki-laki. Namun, untuk kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun, APS laki-laki lebih tinggi daripada kelompok perempuan. Menurut daerah tempat tinggal, APS untuk semua kelompok umur di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Hanya APS 7-12 tahun yang tidak berbeda signifikan.

Dilihat dari kelompok pengeluaran, APS 7-12 tahun relatif sama untuk semua kuintil, APS terendah berada di kuintil 1 sebesar 98,40 dan tertinggi 100 untuk kuintil 5. Hampir semua anak umur 7-12 tahun bersekolah, dari kelompok ekonomi rendah sampai yang berpengeluaran tinggi. APS 13-15 tahun relatif meningkat seiring peningkatan kelompok pengeluaran. APS 13-15 tahun terendah di kuintil pertama, kemudian meningkat di kuintil kedua, namun kuintil ke-3 APS turun dan terus meningkat hingga tertinggi di kuintil 5. Seiring dengan APS 13-15 tahun, APS 16-18 tahun terendah ada di kuintil pertama, diikuti kuintil ke-3, kuintil ke-2 dan kuintil ke-4. APS 16-18 tahun kuintil ke-5 adalah yang tertinggi dibanding kuintil lainnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu, berapapun umurnya, terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. APK digunakan untuk mengukur partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan tertentu. APK juga dapat dijadikan indikator untuk melihat daya serap penduduk umur sekolah di setiap jenjang pendidikan. Jika nilai APK menunjukkan angka lebih dari 100 persen berarti ada penduduk yang sekolah pada jenjang tersebut belum mencukupi umur atau melebihi umur

yang seharusnya. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari pada target yang sesungguhnya.

Mengacu pada target RPJMN 2015-2019, APK SD 114,1, jenjang SMP 106,9, dan SMA 91,6 belum dapat terpenuhi untuk wilayah Provinsi NTB. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2019, APK SD mencapai 108,50, APK SMP 92,07, dan APK SMA 90,86. Untuk jenjang SD, nilai APK melebihi 100, artinya SD di NTB menampung siswa dengan umur di bawah dan di atas umur seharusnya 7-12 tahun. APK SMP dan SMA masih di bawah 100, artinya masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah di SMP dan SMA pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Tabel 3.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019

	Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
Total	108,50	92,07	90,86
Jenis Kelamin			
Laki-laki	108,86	92,78	91,94
Perempuan	108,14	91,29	89,74
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	107,37	93,92	95,30
Perdesaan	109,52	90,36	86,75
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	109,50	89,14	85,80
Kuintil 2	108,09	95,40	90,52
Kuintil 3	107,95	88,10	92,91
Kuintil 4	108,40	96,15	91,46
Kuintil 5	108,54	92,81	93,20

Sumber: Susenas Maret 2019, diolah

Dari tabel 3.4 terlihat bahwa perbedaan gender untuk tingkat SD, SMP dan SMA jelas nampak dari nilai APK laki-laki lebih besar dari nilai APK perempuan. Untuk tingkat SD, APK perempuan terlihat hampir sama dengan

APK laki-laki. Untuk semua kelompok pengeluaran, APK SD bernilai di atas 100. Nilai APK SD tertinggi ada di kuintil 1 dan terendah ada di kuintil ketiga. Nilai APK SMP terendah pada kuintil ketiga dan tertinggi di kuintil keempat. Untuk APK SMA, kelompok masyarakat ekonomi menengah dan tinggi (kuintil ketiga hingga kelima) lebih besar dibanding kelompok ekonomi rendah (kuintil pertama dan kedua). Dilihat dari daerah tempat tinggal, APK SD di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, sebaliknya APK SMP dan SMA jauh lebih tinggi di perkotaan.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) atau *Net Enrollment Ratio* (NER) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Dari tabel 3.5 terlihat nilai APM SD Provinsi NTB 98,87. Nilai ini tidak banyak berbeda untuk anak laki-laki dan perempuan, maupun menurut kelompok pengeluaran rumah tangga. Masyarakat di kuintil 2,4 memiliki APM SD yang lebih tinggi dibanding kuintil yang lain sedangkan APM SD terendah di kuintil 1. Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMP di Provinsi NTB sebesar 83,92, artinya masih ada anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah di SMP. Berdasarkan gender, partisipasi penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP laki-laki lebih besar dibandingkan partisipasi perempuan. Nilai APM SMP dilihat dari kuintil pengeluaran, terendah pada kuintil pertama dan tertinggi di kuintil 2 serta 4.

Tabel 3.5. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019

	Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SD
Total	98,87	83,92	66,04
Jenis Kelamin			
Laki-laki	98,78	84,55	66,19
Perempuan	98,95	83,22	65,88
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	99,73	87,43	69,17
Perdesaan	98,09	80,67	63,14
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	98,18	81,37	60,09
Kuintil 2	99,28	85,92	66,05
Kuintil 3	99,08	82,58	66,07
Kuintil 4	99,12	85,58	70,27
Kuintil 5	98,69	84,99	66,82

Sumber: Susenas Maret 2019, diolah

Persentase penduduk umur 16-18 tahun yang bersekolah SMA di NTB terhadap total penduduk 16-18 tahun sebesar 66,04. Masih ada sekitar 34 dari 100 anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah di tingkat SMA dan sederajat. Partisipasi anak laki-laki usia ini jauh lebih tinggi daripada anak perempuan. Dari segi ekonomi keluarga, anak dari kelompok ekonomi menengah dan tinggi mempunyai partisipasi yang lebih tinggi daripada anak dari keluarga berkemampuan ekonomi rendah.

Menurut daerah tempat tinggal, APM SD tidak terpaut jauh antara di daerah perkotaan dan perdesaan, walaupun APM SD perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Untuk jenjang SMP dan SMA selisih angka partisipasi APM di perkotaan dan perdesaan semakin besar. APM di perkotaan jauh di atas APM di perdesaan pada kedua tingkat pendidikan ini.



CAPAIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Definisi pendidikan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional dibangun atas dasar Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, berkebudayaan bangsa, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pencapaian pendidikan yang inklusif dan berkualitas, merata untuk semua masyarakat merupakan sarana yang handal untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan SDG's keempat, memastikan pendidikan yang inklusif dan merata serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Untuk dapat melihat pencapaian pembangunan pendidikan di Provinsi NTB, berikut dijabarkan indikator angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan ijazah tertinggi yang ditamatkan.

Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis minimal kalimat sederhana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian ini, membaca dan menulis tidak hanya huruf latin, tetapi juga huruf arab dan huruf lainnya. Dengan membaca, masyarakat akan dapat menyerap dan memahami informasi yang berguna dan melanjutkan pembelajaran. Menurut *United Nation*

Development Programme, 6 dari 10 anak dan orang dewasa di dunia tidak mencapai tingkat kemahiran minimum dalam matematika dan membaca.

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis, baik huruf latin dan atau huruf lainnya. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah. Tahun 2018 tercatat penduduk NTB yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 87,59 persen. Dengan kata lain, ke depan pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk menuntaskan buta aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 12,41 persen. Capaian ini masih jauh dari target RPJMN 2019 sebesar 96,1 persen. Tabel 4.1. menyajikan angka melek huruf.

Tabel 4.1. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun ke Atas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019

	Kelompok Umur (tahun)		
	15-24	15-59	15+
Total	99,92	92,54	87,59
Jenis Kelamin			
Laki-laki	99,94	95,66	92,12
Perempuan	99,90	89,70	83,49
Tipe Daerah			
Perkotaan	99,92	94,66	89,92
Perdesaan	99,92	90,51	85,38
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	99,90	89,58	80,92
Kuintil 2	100,00	91,56	85,93
Kuintil 3	99,86	90,49	84,59
Kuintil 4	99,84	93,55	90,00
Kuintil 5	100,00	96,53	95,12

Sumber: Susenas Maret 2019, diolah

Tingkat literasi perempuan usia 15 tahun ke atas (83,49 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (92,12 persen). AMH di daerah perkotaan sebesar 89,92 persen sedangkan di perdesaan 85,38 persen. Dari kemampuan ekonomi rumah tangga, AHM kelompok ekonomi menengah dan tinggi lebih tinggi dibanding AHM golongan ekonomi rendah. Untuk mencapai target RPJMN, perlu digalakkan program keaksaraan terutama kepada wanita, masyarakat perdesaan, dan masyarakat golongan ekonomi rendah.

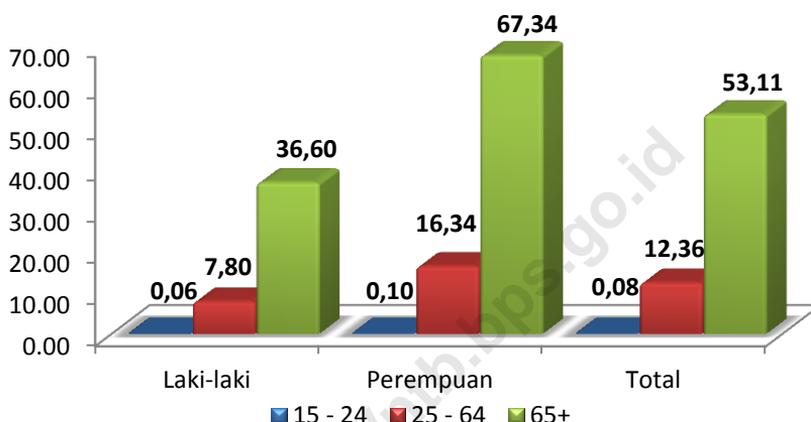
Angka melek huruf untuk kelompok remaja (15-24 tahun) hampir mencapai 100%, artinya hampir seluruh remaja mempunyai kemampuan literasi. Tidak ada perbedaan signifikan untuk gender, tipe wilayah dan kelompok pengeluaran rumah tangga untuk kategori usia 15-24 tahun. Dengan tingginya angka melek huruf di kategori remaja, diharapkan remaja mampu menerima dan memahami informasi yang diterima dengan lebih baik. Diharapkan beberapa tahun ke depan, AMH di Indonesia akan semakin tinggi, sehingga dengan kemampuan literasi yang baik, akan mampu memberikan dampak lanjutan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Untuk kelompok usia 15-59 tahun, angka melek huruf sebesar 92,54. Pada kelompok ini, AMH perempuan (89,70 persen) lebih rendah daripada AMH laki-laki (95,66 persen). AMH daerah perkotaan (94,66 persen) lebih tinggi daripada di daerah perdesaan (90,51 persen). Berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga, semakin tinggi kuintil, semakin tinggi AMH kelompok 15-59 tahun.

Angka buta huruf di masing-masing kelompok umur dapat membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah. Gambar 4.1 menyajikan angka buta aksara menurut kelompok remaja (15-24 tahun), kelompok dewasa (25-64 tahun) dan kelompok lansia (65 tahun ke atas), di NTB tahun 2018. Secara total (laki-laki dan perempuan), sebesar 53,11 persen penduduk lansia tergolong

sebagai buta aksara. Untuk kelompok lain, kelompok dewasa terdapat 12,36 persen penduduk yang masih belum bisa baca tulis, dan untuk kelompok umur remaja hampir semua melek huruf, hanya sebesar 0,08 persen saja yang buta aksara. Dilihat sisi gender, angka buta huruf perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk kategori dewasa dan lansia.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2019

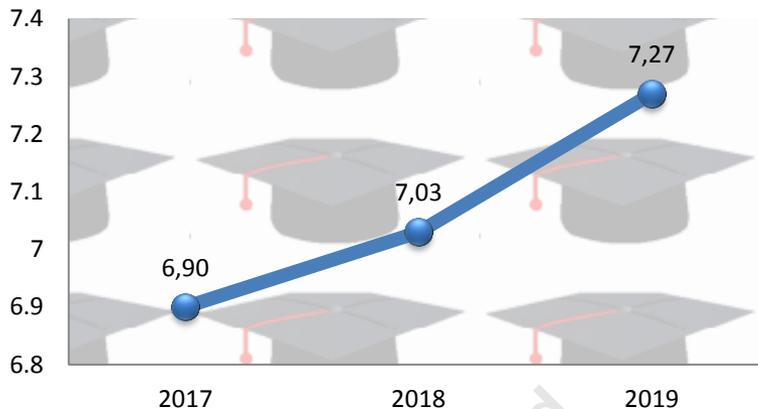


Sumber: Susenas Maret 2019, diolah

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 4.2. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017 – 2019



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa RLS penduduk umur 25 tahun ke atas pada tahun 2019 di NTB mencapai 7,27 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 25 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMP (kelas VII) atau putus sekolah dikelas 2 SMP (Kelas VIII). RLS cenderung meningkat dari tahun 2017 hingga 2019.

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan kualitas SDM yang mumpuni, suatu negara akan dapat menghadapi tantangan perubahan zaman. Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, diharapkan bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji/upah yang sesuai, sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Gambaran kualitas SDM di Provinsi NTB dilihat dari pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk 15 tahun ke atas disajikan pada Gambar 4.4.

Penduduk 15 tahun ke atas sebanyak 19,13 persen lulusan SD/ sederajat, 21,19 persen tamatan SMP/ sederajat, 24,21 persen menamatkan SMA/ sederajat, dan 8,91 persen yang lulus dari perguruan tinggi (DI, DII, DIII, DIV/S1, S2, dan S3). Namun masih ada 26,56 persen penduduk 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah baik karena yang belum pernah bersekolah (8,69 persen) maupun tidak menyelesaikan pendidikan SD/ sederajat (17,87 persen).

Gambar 4.4. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah



PENUTUP

Dari statistik pendidikan 2019 yang telah dijabarkan, kesimpulan berikut dapat menjadi bahan evaluasi pembangunan serta perencanaan di bidang pendidikan, khususnya di Provinsi NTB.

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (3-6 tahun) baru mencapai 42,29 persen dan angka kesiapan sekolah 67,67 persen.
2. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah, baik APS, APK maupun APM di ketiga jenjang pendidikan (SD, SLTP, dan SLTA) di Provinsi NTB, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil angka partisipasinya.
3. Angka melek huruf di NTB tahun 2019 sebesar 87,59 persen. Masih ada penduduk 15 tahun ke atas yang buta huruf, didominasi oleh penduduk usia tua. Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, terdapat 26,56 persen penduduk yang tidak memiliki ijazah, ini juga didominasi oleh penduduk usia tua. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas 7,27 tahun, setara kelas VII SMP.

LAMPIRAN TABEL



Tabel 1
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017-2019

Kabupaten /Kota	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	99,53	99,61	99,69
Lombok Tengah	99,58	99,64	99,47
Lombok Timur	99,45	99,23	99,29
Sumbawa	99,14	98,72	99,04
Dompu	99,09	100,00	100,00
Bima	100,00	99,98	99,49
Sumbawa Barat	99,46	100,00	100,00
Lombok Utara	99,48	98,61	98,87
Kota Mataram	98,64	99,06	99,66
Kota Bima	99,7	100,00	99,61
Nusa Tenggara Barat	99,43	99,43	99,46

Sumber : Susenas Maret 2017-2019

Tabel 2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017-2019

Kabupaten /Kota	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	96,93	96,18	96,49
Lombok Tengah	97,74	97,49	97,65
Lombok Timur	98,78	98,23	98,49
Sumbawa	94,35	95,76	96,25
Dompu	99,06	98,86	99,17
Bima	97,78	99,09	99,06
Sumbawa Barat	95,23	95,16	95,15
Lombok Utara	98,00	98,21	97,08
Kota Mataram	97,76	98,00	98,94
Kota Bima	99,34	98,73	99,18
Nusa Tenggara Barat	97,69	97,72	97,92

Sumber : Susenas Maret 2017-2019

Tabel 3.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019

Kabupaten /Kota	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	75,58	80,02	80,28
Lombok Tengah	72,91	70,03	71,04
Lombok Timur	75,35	73,68	73,81
Sumbawa	73,83	78,11	78,32
Dompu	76,47	75,17	75,78
Bima	87,07	81,00	81,87
Sumbawa Barat	81,20	78,07	78,57
Lombok Utara	67,40	75,16	73,23
Kota Mataram	79,21	86,06	87,53
Kota Bima	85,25	86,36	87,07
Nusa Tenggara Barat	76,61	76,89	77,51

Sumber : Susenas Maret 2017-2019

Tabel 4.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019

Kabupaten /Kota	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	108,10	109,35	106,00
Lombok Tengah	109,32	106,19	108,75
Lombok Timur	108,19	109,98	107,00
Sumbawa	106,73	104,32	105,88
Dompu	113,11	116,49	118,34
Bima	117,90	116,64	115,62
Sumbawa Barat	104,10	107,38	103,91
Lombok Utara	115,23	104,59	114,14
Kota Mataram	103,58	101,79	102,38
Kota Bima	116,05	114,03	109,42
Nusa Tenggara Barat	109,63	108,82	108,50

Sumber : Susenas Maret 2017-2019

Tabel 5.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019

Kabupaten /Kota	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	96,62	97,43	98,15
Lombok Tengah	85,95	89,77	84,08
Lombok Timur	95,38	88,99	89,42
Sumbawa	96,77	101,40	99,32
Dompu	94,57	92,26	89,99
Bima	97,91	91,67	92,69
Sumbawa Barat	100,27	89,44	88,04
Lombok Utara	95,64	98,84	95,96
Kota Mataram	99,94	100,62	98,76
Kota Bima	98,69	108,64	100,82
Nusa Tenggara Barat	94,97	93,83	92,07

Sumber : Susenas Maret 2017-2019

Tabel 6.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019

Kabupaten /Kota	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	80,75	89,45	88,38
Lombok Tengah	105,81	88,80	91,72
Lombok Timur	94,02	87,83	89,62
Sumbawa	83,96	80,12	81,69
Dompu	103,02	105,46	107,05
Bima	94,82	98,43	96,05
Sumbawa Barat	100,27	80,94	93,46
Lombok Utara	80,74	78,48	63,88
Kota Mataram	96,96	92,80	99,73
Kota Bima	101,67	91,41	95,25
Nusa Tenggara Barat	93,89	89,64	90,86

Sumber : Susenas Maret 2017-2019

Tabel 7.
Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD) Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019

Kabupaten /Kota	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	98,02	99,61	99,03
Lombok Tengah	98,01	98,11	98,61
Lombok Timur	96,25	97,97	98,29
Sumbawa	99,14	98,72	98,90
Dompu	99,09	100,00	99,31
Bima	100,00	99,98	99,20
Sumbawa Barat	97,13	100,00	99,81
Lombok Utara	99,48	98,61	98,69
Kota Mataram	98,64	99,06	99,65
Kota Bima	99,70	100,00	99,38
Nusa Tenggara Barat	98,13	98,86	98,87

Sumber : Susenas Maret 2017-2019

Tabel 8.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019

Kabupaten /Kota	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	81,98	83,98	83,79
Lombok Tengah	75,63	77,54	77,42
Lombok Timur	81,11	80,17	81,50
Sumbawa	84,17	82,22	82,88
Dompu	87,85	84,73	83,62
Bima	88,46	89,21	89,02
Sumbawa Barat	88,18	85,87	85,19
Lombok Utara	81,87	79,37	79,31
Kota Mataram	93,65	96,87	96,43
Kota Bima	94,64	96,96	96,91
Nusa Tenggara Barat	83,57	83,88	83,92

Sumber : Susenas Maret 2017-2019

Tabel 9.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019

Kabupaten /Kota	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	59,93	62,62	63,27
Lombok Tengah	65,01	61,93	61,24
Lombok Timur	64,94	64,08	64,37
Sumbawa	57,39	55,98	56,94
Dompu	71,65	69,60	70,04
Bima	78,69	78,12	77,73
Sumbawa Barat	70,80	74,57	75,10
Lombok Utara	49,04	52,95	53,69
Kota Mataram	70,47	74,00	74,35
Kota Bima	75,14	79,29	79,75
Nusa Tenggara Barat	65,67	65,77	66,04

Sumber : Susenas Maret 2017-2019

Tabel 10.
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019

Kabupaten /Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	10,86	20,68	15,96
Lombok Tengah	10,47	21,64	16,53
Lombok Timur	8,34	15,87	12,50
Sumbawa	4,05	10,71	7,31
Dompu	6,25	10,71	8,47
Bima	8,36	15,37	11,92
Sumbawa Barat	1,95	8,29	5,10
Lombok Utara	13,46	28,66	21,23
Kota Mataram	3,23	10,98	7,18
Kota Bima	3,30	7,37	5,38
Nusa Tenggara Barat	7,88	16,51	12,41

Sumber : Susenas Maret 2019

Tabel 11.
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019

Kabupaten /Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	89,14	79,32	84,04
Lombok Tengah	89,53	78,36	83,47
Lombok Timur	91,66	84,13	87,50
Sumbawa	95,95	89,29	92,69
Dompu	93,75	89,29	91,53
Bima	91,64	84,63	88,08
Sumbawa Barat	98,05	91,71	94,90
Lombok Utara	86,54	71,34	78,77
Kota Mataram	96,77	89,02	92,82
Kota Bima	96,70	92,63	94,62
Nusa Tenggara Barat	92,12	83,49	87,59

Sumber : Susenas Maret 2019

Tabel 12.
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2019

Kabupaten /Kota	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	6,15	6,16	6,37
Lombok Tengah	5,95	5,96	6,27
Lombok Timur	6,32	6,45	6,69
Sumbawa	7,54	7,72	7,91
Dompu	8,11	8,12	8,40
Bima	7,58	7,59	7,77
Sumbawa Barat	8,18	8,24	8,53
Lombok Utara	5,54	5,81	5,84
Kota Mataram	9,32	9,43	9,45
Kota Bima	10,14	10,30	10,38
Nusa Tenggara Barat	6,90	7,03	7,27

Sumber : Susenas Maret 2017-2019

Tabel 13.
Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan, 2019

	Tidak/ belum pernah sekolah	Masih Sekolah				Tidak Sekolah lagi	Total
		SD sederajat	SMP sederajat	SMA sederajat	Perguruan Tinggi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lombok Barat	0,00	34,78	20,43	14,27	4,83	25,69	100,00
Lombok Tengah	0,25	37,92	15,37	16,91	6,65	22,90	100,00
Lombok Timur	0,16	37,17	16,72	15,61	3,72	26,61	100,00
Sumbawa	0,51	37,61	14,24	13,62	7,01	27,00	100,00
Dompu	0,67	37,76	17,02	21,14	2,41	20,99	100,00
Bima	0,35	38,37	18,08	15,18	5,37	22,65	100,00
Sumbawa Barat	0,00	37,03	15,83	12,75	6,65	27,75	100,00
Lombok Utara	1,15	37,62	15,06	12,09	4,45	29,63	100,00
Kota Mataram	0,44	26,85	14,80	14,42	17,46	26,02	100,00
Kota Bima	0,00	29,66	14,45	14,90	7,82	33,17	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,29	35,81	16,56	15,33	6,51	25,50	100,00

Sumber : Susenas Maret 2019

Tabel 14.
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan, 2019

	Tidak/ belum pernah sekolah	Masih Sekolah				Tidak Sekolah lagi	Total
		SD sederajat	SMP sederajat	SMA sederajat	Perguruan Tinggi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lombok Barat	0,23	37,59	10,60	15,91	5,70	29,97	100,00
Lombok Tengah	0,18	32,22	16,80	13,03	2,05	35,72	100,00
Lombok Timur	0,41	36,23	14,85	13,95	7,91	26,65	100,00
Sumbawa	0,50	39,40	17,27	14,65	3,46	24,72	100,00
Dompu	0,32	35,38	19,82	17,75	0,73	25,99	100,00
Bima	0,30	37,95	17,67	18,18	1,18	24,72	100,00
Sumbawa Barat	0,00	39,66	17,62	12,53	2,96	27,23	100,00
Lombok Utara	1,45	39,72	15,26	10,12	1,80	31,64	100,00
Kota Mataram	0,58	29,16	14,87	16,09	15,31	24,00	100,00
Kota Bima	0,00	31,06	16,20	19,17	9,69	23,88	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,37	35,39	15,45	14,92	5,64	28,23	100,00

Sumber : Susenas Maret 2019

Tabel 15.
Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan, 2019

	Tidak/ belum pernah sekolah	Masih Sekolah				Tidak Sekolah lagi	Total
		SD sederajat	SMP sederajat	SMA sederajat	Perguruan Tinggi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lombok Barat	0,11	36,14	15,66	15,07	5,25	27,76	100,00
Lombok Tengah	0,22	35,10	16,08	14,99	4,38	29,24	100,00
Lombok Timur	0,29	36,69	15,76	14,76	5,87	26,63	100,00
Sumbawa	0,51	38,45	15,65	14,10	5,36	25,94	100,00
Dompu	0,50	36,62	18,36	19,51	1,61	23,39	100,00
Bima	0,33	38,18	17,89	16,59	3,40	23,62	100,00
Sumbawa Barat	0,00	38,23	16,65	12,65	4,96	27,51	100,00
Lombok Utara	1,30	38,65	15,16	11,13	3,15	30,61	100,00
Kota Mataram	0,51	27,95	14,84	15,22	16,43	25,05	100,00
Kota Bima	0,00	30,36	15,33	17,04	8,76	28,50	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,33	35,60	16,02	15,13	6,08	26,83	100,00

Sumber : Susenas Maret 2019

Tabel 16.
Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut
Ijazah/STTB yang Dimiliki, 2019

	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak punya ijazah SD	SD sederajat	SMP sederajat	SMA sederajat	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lombok Barat	8,38	16,78	18,55	18,96	26,94	10,40	100,00
Lombok Tengah	7,20	18,38	20,13	25,13	21,53	7,63	100,00
Lombok Timur	5,74	19,57	20,43	26,57	20,40	7,30	100,00
Sumbawa	2,39	14,10	24,33	22,08	28,23	8,87	100,00
Dompu	3,02	16,52	11,97	20,51	35,27	12,71	100,00
Bima	2,98	18,24	16,88	18,81	33,77	9,32	100,00
Sumbawa Barat	1,24	9,06	26,91	17,89	34,63	10,27	100,00
Lombok Utara	11,84	19,43	21,11	16,08	24,16	7,38	100,00
Kota Mataram	2,76	7,82	14,67	21,75	41,47	11,53	100,00
Kota Bima	1,90	7,26	10,00	15,52	48,43	16,89	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,33	16,17	18,99	22,14	28,09	9,28	100,00

Sumber : Susenas Maret 2019

Tabel 17.
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut
Ijazah/STTB yang Dimiliki, 2019

	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak punya ijazah SD	SD sederajat	SMP sederajat	SMA sederajat	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lombok Barat	14,95	22,13	16,33	20,48	18,05	8,06	100,00
Lombok Tengah	15,08	23,90	19,75	20,75	15,64	4,89	100,00
Lombok Timur	12,41	19,73	21,68	22,14	17,89	6,16	100,00
Sumbawa	6,09	17,98	25,00	20,48	17,66	12,79	100,00
Dompu	5,68	21,21	15,07	20,21	24,20	13,64	100,00
Bima	6,84	22,34	14,11	18,91	28,83	8,96	100,00
Sumbawa Barat	6,13	12,14	27,16	17,26	23,76	13,54	100,00
Lombok Utara	25,79	17,23	18,61	16,02	17,69	4,65	100,00
Kota Mataram	9,36	9,14	19,09	19,60	29,53	13,29	100,00
Kota Bima	3,22	12,03	10,35	17,93	38,19	18,28	100,00
Nusa Tenggara Barat	11,72	19,41	19,26	20,34	20,69	8,57	100,00

Sumber : Susenas Maret 2019

Tabel 18.
Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas
Menurut Ijazah/STTB yang Dimiliki, 2019

	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak punya ijazah SD	SD sederajat	SMP sederajat	SMA sederajat	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lombok Barat	11,80	19,56	17,40	19,75	22,32	9,18	100,00
Lombok Tengah	11,47	21,37	19,92	22,75	18,34	6,15	100,00
Lombok Timur	9,42	19,65	21,12	24,12	19,01	6,67	100,00
Sumbawa	4,20	16,00	24,66	21,30	23,05	10,79	100,00
Dompu	4,35	18,86	13,51	20,36	29,75	13,17	100,00
Bima	4,94	20,32	15,47	18,86	31,26	9,14	100,00
Sumbawa Barat	3,67	10,59	27,04	17,58	29,23	11,89	100,00
Lombok Utara	18,98	18,31	19,83	16,05	20,85	5,98	100,00
Kota Mataram	6,13	8,49	16,93	20,65	35,38	12,43	100,00
Kota Bima	2,58	9,70	10,18	16,76	43,18	17,60	100,00
Nusa Tenggara Barat	8,69	17,87	19,13	21,19	24,21	8,91	100,00

Sumber : Susenas Maret 2019

Tabel 19.
Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Menurut Partisipasi Pra Sekolah,
2019

	Masih/ pernah mengikuti prasekolah tahun ajaran ini (2018/2019)	Pernah mengikuti prasekolah tahun ajaran ini (2018/2019)	Pernah mengikuti prasekolah sebelum tahun ajaran 2018/2019	Tidak/ belum pernah mengikuti prasekolah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lombok Barat	20,02	0,51	3,57	75,89	100,00
Lombok Tengah	26,71	0,15	3,02	70,13	100,00
Lombok Timur	23,45	1,08	2,79	72,68	100,00
Sumbawa	28,95	1,98	2,04	67,03	100,00
Dompu	13,34	1,71	6,54	78,42	100,00
Bima	18,55	2,34	11,57	67,54	100,00
Sumbawa Barat	31,09	1,18	2,56	65,18	100,00
Lombok Utara	14,81	3,29	1,85	80,05	100,00
Kota Mataram	25,66	0,00	2,48	71,85	100,00
Kota Bima	28,57	0,91	6,61	63,91	100,00
Nusa Tenggara Barat	23,22	1,08	4,02	71,69	100,00

Sumber : Susenas Maret 2019

Tabel 20.
Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pra Sekolah Menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2019

	Taman Kanak-kanak	Bustanul Athfal/ Raudatul Athfal	PAUD terintegrasi, BKB/Taman Posyandu, PAUD-AAM, PAUD-PAK	Kelompok bermain	Taman Penitipan Anak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lombok Barat	45,22	4,85	48,11	0,06	1,76	100,00
Lombok Tengah	41,20	2,41	55,53	0,86	0,00	100,00
Lombok Timur	67,42	5,66	25,57	1,35	0,00	100,00
Sumbawa	46,64	1,74	48,86	2,76	0,00	100,00
Dompu	43,25	0,20	56,55	0,00	0,00	100,00
Bima	70,68	0,92	19,53	8,87	0,00	100,00
Sumbawa Barat	77,98	2,75	18,42	0,85	0,00	100,00
Lombok Utara	39,32	2,85	57,83	0,00	0,00	100,00
Kota Mataram	53,38	6,92	38,84	0,00	0,86	100,00
Kota Bima	72,40	4,21	23,40	0,00	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	55,49	3,59	38,83	1,82	0,27	100,00

Sumber : Susenas Maret 2019



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terjaminnya kualitas pendidikan yang merata dan inklusif serta meningkatkan kesempatan sepanjang hayat menjadi tujuan keempat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di Indonesia, pembangunan pendidikan dipercaya sebagai bagian dalam menciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Muara pembangunan pendidikan tercermin dalam tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Isu pendidikan seperti pendidikan tidak merata, diskriminasi gender dalam pendidikan, pendidikan berkualitas itu “mahal” juga menjadi perhatian masyarakat global sehingga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berkomitmen untuk mewujudkan Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) yang berisikan tujuan: (1) memperluas pendidikan usia dini, (2) menyediakan pendidikan dasar yang gratis dan wajib (Wajib Belajar), (3) meningkatkan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), (4) meningkatkan angka melek huruf, (5) menghapus kesenjangan gender, dan (6) meningkatkan mutu pendidikan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain pengembangan akses terhadap pendidikan anak usia dini, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, evaluasi dan perbaikan kurikulum serta peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru. Dengan pembangunan pendidikan yang berkualitas, masyarakat mempunyai daya saing

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Jalan Gunung Rinjani No.2, Mataram 83125
Telp. (0370) 621385, Fax. (0370) 623801
Homepage: <http://ntb.bps.go.id> Email: ntb@bps.go.id